

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang - Undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Adnan, Muchlis I., 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi : Edisi Revisi*, Yogyakarta : Transmedia Grafika.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshiddiqie Jimly, 2015, *Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Padang : Unand Press.
- Bachri Syaiful, 2020, *Hukum Sanksi*, Jakarta : UM Jakarta PressWaluyo.
- Djulaeka dan Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Fuady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung : Refika Aditama.
- Fuady Munir, 2013, *Teori – Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Huda Uu N., et al, 2022, *Problematika Yuridis Tahapan Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Mahmud P., 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo Soedikno, 2005, *Mengenal Suatu Pengantar Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Nugroho Riant, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, 1980, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, Bandung : Nusa Media.
- Raharjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Santoso Topo dan Budiati Idha, 2019, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subechi Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutoyo Anwar, 2009, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS dan Nurbaeni Erlies S., 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Santoso, Aris P. A., 2022, *Pengantar Legal Drafting*, Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Wijayanti Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

B. JURNAL/ARTIKEL

- Titis Anindyajati et al, 2022, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12(4), Hlm. 877.
- Anggistya Divani K. dan Alisya Abdillah Afifah M. P., 2023, Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatic, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol 1(1), 28 Februari, Hlm 50.
- Aulia Nurul, 2019, Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan

Mobil Dinas Diluar Jam Kerja, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 3(3), Hlm 445, Doi : <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>.

Ardenolis A. dan Sudi Fahmi, 2020, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 13(2), Hlm 135 – 154, Doi : <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3908>.

AR Suhariyono, 2012, Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, *Jurnal Perspektif*, Vol 17(1), Hlm 20 - 28.

Asya'ri Hasyim, 2022, *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Hlm 5.

Daniel Mulia Djati et al, 2022, Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ikamakumi*, Vol 2(1), Hlm 591.

Dika, Septian U., 2022, Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas, *Jurist-diction*, Vol 5(4), 31 Juli, Hlm 1604. Doi : 10.20437/jd.v5i4.37360.

Ekayanti Lalita Nabia *et al*, 2020, Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, *Diponegoro Law Journal*, Vol 9(2), Hlm 348.

Fariza Siti, 2019, Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *STAATRECHT : Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol 3(1), Hlm 156.

Fikri Abdullah dan Kartika Adhitya W., 2023, Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas : Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, *INKLUSI Journal of Disability Studies*, Vol 10(1), Hlm 24. Doi : 10.14421/ijds.100102.

Firmansyah, Muchammad I. dan Rahmanto Fajar, 2021, Politik Anggaran : Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas, *Jurnal Wacana Politik*, Vol 6(1), Hlm 27, Doi : 10.24198/jwp.v6i1.29422.

- Hikmawati Puteri, 2019, Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya, *Parliamentary Review : Pemilihan Umum 2019*, Vol 1(1), Hlm 2.
- Iftiyatna Yayat dan Asrinaldi, 2022, Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9(5), Hlm 1627. Doi : <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1626-1632>.
- Mathar Achmad, 2023, Sanksi dalam Peraturan Perundang - Undangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3(2), Hlm 46.
- Mulyawan Wawan dan Alia Widia, 2020, APBN dan Pendapatan Nasional, *Islamic Economic Journal*, Vol 1(2), Hlm 59 – 67.
- Negara, I Nyoman P., 2021, Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014), *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10(10), Hlm 28, Doi : KW.2021.v10.i10.p05.
- Novianto M. Hantoro, 2016, Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara : Permasalahan Kategori Pejabat Negara, *Negara Hukum*, Vol 7(2), Hlm 151, Doi : <https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.929>.
- Pratama, Arnando R., 2022, Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era *New Normal* di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3(1), Hlm 108, Doi : <https://doi.org/10.32815/jpm.v3i1.1183>.
- Pratiwi Dian Kus *et al*, 2019, Pengenalan Hak – Hak Konstitusional di Sekolah, *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Vol 1(1), Hlm 24.
- Salsabila Nabila, 2020, Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indosia, *Notarius*, Vol 13(1), Hlm 138, Doi : <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- Sari, Permata I., 2016, Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3(2), Hlm 3.
- Subechi Imam, 2012, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1(3), 3 Nopember, Hlm 340.
- Susanto, Haris S. N., 2019, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2(1), Hlm 126.

Wijaya Henri, 2020, Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 4(1), Hlm 87.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

D. LAIN – LAIN

Ariesta Anggie, 2024, Sri Mulyani Tegaskan Bansos Merupakan Program APBN, *INews.Id*, Tertanggal 30 Januari 2024, Diakses di <https://inews.id> Pada tanggal 21 Mei 2024, Jam 04.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Sanksi, *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*, Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Pejabat Negara, *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi* Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa , 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Kampanye, *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*, Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 17.00 WIB.

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 2024, Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang, *Sekretariat Presiden*, Tertanggal 26 Januari, Diakses di <https://www.presidentri.go.id> Pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 23.00 WIB.

- Bryan A Garner, 1999, *Black Law's Dictionary 7th Edition*, United State Of America : West Group, Hlm 1341.
- CNN Indonesia, 2024, Januari, Dugaan Politisasi Bansos, *CNN Indonesia*, Tertanggal 19 Januari 2024 Diakses di <https://youtu.be/LXsVMECrY-s?feature=shared> Pada tanggal 01 April 2024, Pukul 18.18 WIB.
- CNN Indonesia, 2024, Maret, Bawaslu Putuskan Zulhas Bersalah Kampanye Tanpa Cuti, Disanksi Teguran, *CNN Indonesia*, Tertanggal 01 Maret 2024, Diakses di <https://www.cnnindonesia.com>, Pada tanggal 05 Mei, Pukul 21.20 WIB.
- Humas Sekretariat Kabinet republik Indonesia, 2017, Inilah Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, Tertanggal 22 Agustus 2017, Diakses di <https://setkab.go.id> Pada tanggal 22 Februari 2024, Jam 16.00 WIB.
- Jamil, 2020, Januari, *Omnibus Law* antara Pemilu dan Pemilihan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur*, Tertanggal 09 Januari 2020, Diakses di <https://jatim.bawaslu.go.id> Pada tanggal 03 April 2024, Jam 20.24 WIB.
- Khaerunnailla Wa Ode F., 2018, *Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*, Tesis, Malang : Universitas Brawijaya, Hlm 7.
- Metro Tv, 2023, Desember, Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, *Metro TV*, Tertanggal 30 Desember 2023 Diakses di <https://youtu.be/cWzIzH-MJ8?feature=shared> Pada tanggal 25 Februari, Pukul 23.40 WIB.
- Sabekti Wahid S., 2020, *Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang – Undang Dasar 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)*, Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syaarif Hidayatullah Jakarta, Hlm 3.